



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

**KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

KECAMATAN SIDAMULIH

e-mail : sidamulihkec11@gmail.com

Jalan Raya Sidamulih No. 80. Tlp. (0265) 639858 KodePos 46365

KEPUTUSAN CAMAT SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 050/ 26 / Kpts -Kec/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023

CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Sidamulih RPJPD, RPJMD dan RKPD, dipandang perlu menyusun Rancangan Sidamulih Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangana sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 23. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
 24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 26. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstream;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237 (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262)
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 No. 53);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
50. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
52. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 78);
53. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 82)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023



MEGI RITUA PARLUMI, SE.,MM

NIP. 19770210 200901 1 007

Lampiran : **KEPUTUSAN CAMAT SIDAMULIH KAB. PANGANDARAN**
NOMOR : 050/ 26 / Kpts – Kec/ 20223
TANGGAL : 25 Agustus 2023

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN
PANGANDARANTAHUN ANGGARAN 2023**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Kecamatan Sidamulih
 2. Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Sidamulih RPJPD, RPJMD dan RKPD, Dengan sistematika sebagai berikut :
- I. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
 - II. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2023
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2023
 - 2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD
 - III. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
 - 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
 - IV. Penutup
- B. Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidamulih Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Sidamulih Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023


CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
MEGI RIJA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang telah ditetapkan untuk Tahun anggaran 2023.

Perubahan Rencana Kerja ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dantingkat keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam penyusunannya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, serta keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) inidapat dijadikan acuan oleh semua fihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tentunya masukan ataupun saran yang membangun akan senantiasa kami akomodir guna perbaikan dan peningkatan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaranini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023


CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
MEGI RUDJA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
 1.1 LATARBELAKANG
 1.2 LANDASAN HUKUM
 1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN
 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SKPD TAHUN LALU.....
 2.1 EVALUASI RENJA SAMAPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
 2.2 PERMASALAHAN YANG ADA PADA SKPD.....
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN.....
 3.1 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATANSKPD TAHUN 2023
BAB IV. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Renja Kecamatan Sidamulih tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Kecamatan Sidamulih adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

- Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 19 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 20 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 22 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
- 23 Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

- 24 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 25 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 26 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,

- Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 38 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 39 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
- 40 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237 (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
- 41 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262)
- 42 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
- 43 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
- 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

- 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
- 46 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
- 47 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
- 48 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 No. 53);
- 49 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);
- 50 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
- 51 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 71);
- 52 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 78);
- 53 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 82).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Renja Kecamatan Sidamulih dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat progam dan kegiatan pembangunan daerah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun dalam pembinaan

kemasyarakatan terutama pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat Sidamulih selama tahun 2023.

2. Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sidamulih Tahun 2023 adalah sebagai acuan kecamatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya dalam mencapai Visi misi jangka menengah daerah kabupaten pangandaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :

II. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.4. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2022

2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

V. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan

5.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

VI. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
SIDAMULIH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2023

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sidamulih tahun 2023 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan, adapun fungsi dari Kecamatan Sidamulih adalah :

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
- d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
- e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
- f) Melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDAMULIH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rancangan Kerja Kecamatan Sidamulih tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 1.508.091.672,-

Adapun Pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 sampai dengan triwulan II tahun 2023 di Kecamatan Sidamulih antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.482.417.632,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.84.930319,- yang diimplementasikan ke dalam 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 17.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD.

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 19.6000.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.249.765.059,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp.550.651.065,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 1.232.165.059,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 543.851.065,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 17.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 17.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 17.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.800.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 14.600.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 5.600.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 14.600.000 dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 5.600.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 36.246.647,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 10.387.500 dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 793.743,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 252.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 18.162.838,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 4.958.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.981.370,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 435.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
 - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 9.975.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 4.742.500,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.

- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 16.146.600,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 9.000.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
- a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 14.127.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 9.000.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Administrasi perkantoran yang Akuntabel dan Transfaran.
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 99.059.045,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 31.062.619,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 975.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 325.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 24.590.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 6.976.619,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 73.494.045,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 23.761.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 31.400.281,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 8.480.200,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 24.652.207,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 8.000.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 230.200,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 250.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 25.319.040,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 25.319.040,- yang diimplementasikan ke dalam 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 25.020.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 25.020.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Dan Kinerja Aparatur Kecamatan.
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp. 25.020.000,- dengan Realiasi Anggaran Sebesar Rp. 25.020.000,- dan Sasaran dari Kegiatan Ini adalah Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pelayanan Dan Kinerja Aparatur Kecamatan.

2.1 PERMASALAHAN YANG ADA PADA SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sidamulih bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati Pangandaran kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Develompment Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Sidamulih harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjawab isu-isu tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap tahun selalu berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antara bidang dan sib bidang meupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah dan masyarakat publik. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, seminar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perencanaan.

Selain itu, dengan adanya peluang kerjasama antar pemerintah dan masyarakat terkait Implementasi kebijakan Peraturan Daerah, diharapkan Kecamatan Sidamulih dapat terus menjalin kerjasama yang baik supaya kebijakan tersebut dapat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sidamulih agar dapat menjadikan kemudahan dalam penyampaian kebijakan Darah terhadap masyarakat sekitar yang sesuai dengan keadaan pembangunan di Kecamatan Sidamulih.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, kecamatan didorong agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yaitu Pendekatan politik, teknokrasi, partisipasi, top down dan battom up. Namun demikian dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang baik serta peraturan perundang-undangan yang semakin lengkap maka tantangan itu secara bertahap dan berkeninambungan akan dapat dipenuhi.

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Sidamulih maka program-program yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renja tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Rogram Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan :

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Kegiatan lain yang tidak masuk anggaran SKPD antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi :

- a. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
- b. Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan

2. Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan
- b. Pembinaan Desa
- c. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- d. Pembinaan untuk RT/RW di Kecamatan Sidamulih

3. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan, meliputi :

- a. Monitoring kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

1.4. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023

Perubahan Program dan Kegiatan Renja Kecamatan Sidamulih Tahun 2023 adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula Rp. 2.553.395.938,- menjadi Rp. 1.492.100.154,-

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang semula Rp. 69.072.960,- menjadi Rp. 21.000.000,-

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang semula Rp. 59.173.120,- menjadi Rp. 21.000.000,-

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang semula Rp. 1.939.276.594,- menjadi Rp. 1.258.415.877,-
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang semula Rp. 1,879,701,214,- menjadi Rp. 1,237,415,877,-
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang semula Rp. 57,580,380,- menjadi Rp 21,000,000,-
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang semula Rp. 49.160.606,- menjadi Rp. 21,000,000,-
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang semula Rp. 44,144,760,-menjadi Rp. 21.000,000,-
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang semula Rp. 101.105.685,- menjadi Rp. 17,400,000,-
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang semula Rp. 27,462,200,- menjadi Rp 17,400,000,-
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang semula Rp. 82.885.306,- menjadi Rp. 31.912.951,-
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang semula Rp. 873,405,- menjadi Rp. 793,743,-
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang semula Rp. 24,833,389,-menjadi Rp. 18,162,838,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang semula Rp. 5,150,370,-menjadi Rp. 2,981,370,-
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang semula Rp. 35,070,000,- menjadi Rp. 9,975,000,-
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang semula Rp. 119.054.400,- menjadi Rp. 9.537.000,-
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang semula Rp. 101,673,600,- menjadi Rp. 9,537,000,-
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 144.719.045,- menjadi Rp. 88.009.045,-
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang semula Rp. 975.000,- menjadi Rp. 975.000,-
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang semula Rp. 29,240,000,- menjadi Rp. 19,740,000,-
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semula Rp. 114,504,045,-menjadi Rp. 67,294,045,-
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 48.121.342,- menjadi Rp. 35.900.281,-

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang semula Rp. 35,984,894,- menjadi Rp. 29,152,207,-
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula Rp. 3,750,000,- menjadi Rp. 2,250,000,-
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang semula Rp. 6,750,000,- menjadi Rp. 3.000.000,-
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang semula Rp. 1,636,448,- menjadi Rp. 1,498,074,-
- 2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang semula Rp. 55.277.640,- menjadi Rp. 25.020.000,-
- a) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang semula Rp. 55.277.640,- menjadi Rp. 25.020.000,-
- Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang semula Rp. 43,860,000,- menjadi Rp. 25.020.000,-

(Tabel 1 : Rumusan Rencana perubahan Program dan Kegiatan SKPD tahun 2023 Kecamatan Sidamulih)

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

No	Kode	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2022)				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2022)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2022		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2023 (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	Sum ber Dana	Cata tan
						Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubah an	Setelah Peruba han		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
		KECAMATAN SIDAMULIH													
		UNSUR KEWILAYAHAN													
				KECAMATAN						653.801.384	2.815.931.578	1.517.120.154	-		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						628.781.384	2.553.395.938	1.492.100.154			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.800.000	69.072.960	21.000.000			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Dokumen	14	4	6.800.000	59.173.120	21.000.000	(38.173.120)	PAD	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					550.651.065	1.939.276.594	1.258.415.877			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	Orang	11	12	543.851.065	1.879.701.214	1.237.415.877	(642.285.337)	PAD	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SDM Pengelola administrasi keuangan SKPD	Dokumen	60	5	6.800.000	57.580.380	21.000.000	(36.580.380)	PAD	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6.800.000	49.160.606	21.000.000			

							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	6.800.000	44.144.760	21.000.000	(23.144.760)	PAD	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.600.000	101.105.685	26.325.000			
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25	25	0	9.960.385	8.925.000	(1.035.385)		
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SDM Pengelola Kepegawaian	Dokumen	1	12	5.600.000	27.462.200	17.400.000	(12.400.000)	PAD	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah					10.387.500	82.885.306	31.912.951			
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Paket	2	1	252.000	873.405	793.743	(79.662)	PAD	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	Paket	38	1	4.958.000	24.833.389	18.162.838	(6.670.551)	PAD	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan dan Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	Jenis	2	1	435.000	5.150.370	2.981.370	(2.169.000)	PAD	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	Jenis	2	1	0	3.876.000	0	(3.876.000)	PAD	
							Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	2	1	0	13.082.142	0	(13.082.142)	PAD	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	4.742.500	35.070.000	9.975.000	(25.095.000)	PAD	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					9.000.000	119.054.400	9.537.000			
							Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	3	3	0	7.221.600	0	(7.221.600)	PAD	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	7	1	9.000.000	101.673.600	9.537.000	(92.136.600)	PAD	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	1	0	10.159.200	0	(10.159.200)	PAD	

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 diharapkan akan memberikan arahan atau “guidance” serta sebagai tolok ukur dalam menjalankan kinerja Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya , Perubahan Rencana Kerja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayaguna aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Sebagai Pusat Pemerintahan Didukung Pelayanan Profesional Dan Potensi Pariwisata Dengan Mempertahankan Kearifan Lokal Untuk Mewujudkan KabupatenPangandaran Sebagai Kabupaten Pariwisata Yang Mendunia.

Ditetapkan di : Sidamulih
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023


CAMAT SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN
MEGI RIJUA PARLUMI, SE.,MM
NIP. 19770210 200901 1 007

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,815,931,578	1,371,846,435	1,517,120,154					3,152,405,424			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi						2,553,395,938	1,346,172,395	1,492,100,154					100 %	2,852,729,564		
						2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%		%	100 %	100 %								100 %			
						3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%		%	100 %	100 %								100 %			
						4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%		%	100 %	100 %								100 %			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	69,072,960	17,600,000	21,000,000					4 Dokumen	81,897,156		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	59,173,120	17,600,000	21,000,000	Kab. Pangandaran Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	4 Dokumen	70,976,906	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2,199,960	0	0	Kab. Pangandaran Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	4 Dokumen	2,420,000	KECAMATAN SIDAMULIH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2,199,960	0	0	Kab. Pangandaran Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	4 Dokumen	2,420,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2,199,960	0	0	Kab. Pangandaran Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	4 Dokumen	2,420,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2,199,960	0	0	Kab. Pangandaran Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	4 Dokumen	2,420,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1,100,000	0	0	Kab. Pangandaran Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	4 Laporan	1,240,250	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	11 Orang/Bulan	11 Orang/Bulan	1,939,276,594	1,113,519,822	1,258,415,877				11 Orang/Bulan	2,140,253,306			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/Bulan	11 Orang/Bulan	1,879,701,214	1,095,919,822	1,237,415,877	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	11 Orang/Bulan	2,067,671,335	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	57,580,380	17,600,000	21,000,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	5 Dokumen	70,387,031	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,033,760	0	0	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 Laporan	1,137,400	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	961,240	0	0	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 Laporan	1,057,540	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49,160,606	17,600,000	21,000,000					12 Laporan	54,244,300		
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5,015,846	0	0	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	12 Laporan	5,517,600	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	44,144,760	17,600,000	21,000,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	12 Laporan	48,726,700	KECAMATAN SIDAMULIH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	11 Orang	11 Orang	101,105,685	14,600,000	26,325,000					11 Orang	111,728,012		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	9,960,385	0	8,925,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	25 Paket	11,007,612	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	27,462,200	14,600,000	17,400,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 Dokumen	30,250,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3,188,100	0	0	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 Dokumen	3,920,400	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	60,495,000	0	0	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	11 Orang	66,550,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	82,885,306	36,246,647	31,912,951					1 Paket	91,765,150		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	873,405	793,743	793,743	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 Paket	975,263	KECAMATAN SIDAMULIH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,833,389	18,162,838	18,162,838	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 Paket	27,476,213	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,150,370	2,981,370	2,981,370	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 Paket	5,825,606	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 paket	1 paket	3,876,000	1,836,000	0	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 paket	4,341,480	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,082,142	2,497,696	0	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 Paket	14,520,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	35,070,000	9,975,000	9,975,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	6 Laporan	38,626,588	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	119,054,400	16,146,600	9,537,000					10 Unit	132,646,960		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	7,221,600	2,019,600	0	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	3 Unit	8,016,960	KECAMATAN SIDAMULIH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	101,673,600	14,127,000	9,537,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	10 Unit	112,530,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10,159,200	0	0	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	2 Unit	12,100,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%		%	100 %	100 %	144,719,045	99,059,045	88,009,045				100 %	170,777,948			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan				75 Buah	75 Buah	975,000	975,000	975,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	75 Buah	1,306,800	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik disediakan Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik disediakan				2 Rekening 12 Bulan	2 Rekening 12 Bulan	29,240,000	24,590,000	19,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	2 Rekening 12 Bulan	32,583,848	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114,504,045	73,494,045	67,294,045		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	12 Laporan	136,887,300	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%		%	100 %	100 %	48,121,342	31,400,281	35,900,281				100 %	69,416,732			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan				6 Unit	6 Unit	35,984,894	24,652,207	29,152,207		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	6 Unit	56,106,732	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Periziinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	3,750,000	2,250,000	2,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	14 Unit	7,260,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola				14 Unit	14 Unit	6,750,000	3,000,000	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	14 Unit	4,235,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1,636,448	1,498,074	1,498,074		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	1 Unit	1,815,000	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	200,026,000	0	0					100 %	223,898,400		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koodinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	188,711,000	0	0					100 %	207,636,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Pemerintahan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait yang diselenggarakan Jumlah Koordinasi Pemerintahan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait yang diselenggarakan				7 Desa 12 Bulan	7 Desa 12 Bulan	188,711,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	7 Desa 12 Bulan	207,636,000	KECAMATAN SIDAMULIH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	11,315,000	0	0					100 %	16,262,400		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	11,315,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	12 Bulan	16,262,400	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	persen		persen	100 persen	100 persen	3,400,000	212,000	0					100 persen	3,914,350		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persen		persen	100 persen	100 persen	3,400,000	212,000	0					100 persen	3,914,350		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa Yang di Monitoring Pelaksanaan Musrenbangnya				7 Desa	7 Desa	3,400,000	212,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	7 Desa	3,914,350	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	3,832,000	143,000	0					100 %	4,216,850		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	3,832,000	143,000	0					100 %	4,216,850		
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Verifikasi Bantuan Keuangan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	3,832,000	143,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulih	10 Dokumen	4,216,850	KECAMATAN SIDAMULIH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pangandaran

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	55,277,640	25,319,040	25,020,000				100 %	67,646,260			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	%		%	100 %	100 %	55,277,640	25,319,040	25,020,000				100 %	67,646,260			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Jumlah Desa yang melaksanakan PILKADES serentak (tahun 2022) 1. Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Jumlah Desa yang melaksanakan PILKADES serentak (tahun 2022)				5 Kali 7 Desa	5 Kali 7 Desa	2,637,640	149,240	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulhi	5 Kali 7 Desa	2,901,580	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD				2 Kegiatan 7 Dokumen	2 Kegiatan 7 Dokumen	43,860,000	25,020,000	25,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulhi	2 Kegiatan 7 Dokumen	48,482,280	KECAMATAN SIDAMULIH
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pembangunan Desa Wisata				5 Kali	5 Kali	8,780,000	149,800	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Sidamulhi	5 Kali	16,262,400	KECAMATAN SIDAMULIH
TOTAL												2,815,931,578	1,371,846,435	1,517,120,154					3,152,405,424			